

PERKEMBANGAN GERAKAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Audra Jovani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia

audra.jovani@yahoo.com

Abstrak

Makalah ini membahas gerakan perempuan di Indonesia, selama pendudukan Jepang, masa setelah Proklamasi Kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru dan Periode Reformasi. Sebagai sebuah gerakan sosial yang didukung oleh banyak orang dengan tujuan yang jelas untuk memperbaiki posisi dan peran perempuan memperjuangkan hak-haknya dan membela hak-hak politik, ekonomi dan sosial yang sama bagi perempuan.

Kata Kunci: Gerakan perempuan, Politik, Sejarah Indonesia.

Abstract

This paper examines the women's movement in Indonesia, during the Japanese occupation, the period after the Proclamation of Independence, a period of Guided Democracy, the New Order Period and the Reform Period. As a social movement that is supported by many people with a clear objective to improve the position and role of women asserting their rights and equal political, economic and social rights defending for women.

Keywords : *Women Movement, Politics, History of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Gerakan perempuan baru timbul dalam abad ke-18 yaitu di Perancis. Gerakan tersebut didorong oleh ideologi Pencerahan (Aufklarung) yang menyatakan bahwa manusia diberi kemampuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan rasio (akal). Semua manusia, laki-laki dan wanita, pada dasarnya adalah makhluk rasional, maka penting adalah pendidikan untuk meningkatkan kecerdasannya. Kecerdasan dianggap syarat mutlak untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam Revolusi Perancis (1789-1793) para pemimpin mengaskan hak-hak warga negara terhadap kekuasaan raja. Ada kelompok-kelompok perempuan yang beranggapan bahwa kepentingan perempuan diabaikan, padahal dalam Revolusi Perancis banyak perempuan memegang peranan. Mereka menuntut hak perempuan sejajar dengan laki-laki (equality) di bidang politik, kesempatan memperoleh pendidikan, perbaikan dalam hukum perkawinan dan lain sebagainya.

Revolusi tahun 1789 tidak banyak memberikan keuntungan bagi perempuan, bahkan perkumpulan-perkumpulan perempuan dilarang dan dalam hukum perdata yang disusun oleh pemimpin-pemimpin Revolusi dan disahkan oleh Napoleon I menunjukkan rendahnya kedudukan perempuan. Menurut hukum, suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap istrinya, terhadap harta istrinya dan terhadap anak-anaknya. Istri harus tunduk kepada suaminya, tidak diperbolehkan mengadakan transaksi secara hukum tanpa izin suaminya. Istri yang berzinah dapat dihukum penjara 2 tahun, dan kalau tertangkap basah, suaminya boleh membunuhnya tanpa mendapat hukuman. Sebaliknya, suami yang berzinah bebas hukuman. Perempuan juga dilarang menghadiri rapat-rapat politik atau berpakaian celana panjang, dan bila berjalan tanpa pengantar ia bisa ditangkap oleh polisi karena dianggap pelacur (Evans, 1979: 125).

Setelah mengalami berbagai hambatan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di bidang politik, maka baru tahun 1870-an gerakan perempuan di Perancis merupakan organisasi yang kuat. Hal ini dimungkinkan karena Perancis menjadi republik yang lebih demokratis.

Gerakan Perempuan di Inggris dan di Amerika Serikat

Tokoh utama yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan adalah Mary Wollstonecraft. Bukunya yang sangat berpengaruh adalah *A Vindication of the Rights of Women* yang terbit tahun 1792. Dalam buku ini ditegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan karena pada waktu itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan formal. Dengan pendidikan bagi perempuan maka mereka dapat mengembangkan rasionya. Mereka akan menjadi warga negara yang berguna dan seluruh umat manusia akan maju.

Tokoh lain yang memperjuangkan hak-hak bagi perempuan adalah John Stuart Mill yang dalam bukunya berjudul *The Subjection of Women*, terbit tahun 1869, dianggap Kitab Suci bagi pergerakan perempuan di Eropa. Buku ini sangat berpengaruh, karena Mill menghubungkan gerakan perempuan (yang kemudian disebut dengan gerakan feminisme) dengan pemikiran liberalisme. Liberalisme memandang bahwa dunia terdiri dari sekian banyak atom, individu-individu yang bersama-sama bersaing untuk meraih keuntungan bagi masing-masing. Persaingan yang bebas ini akan bermanfaat pula bagi masyarakat, karena yang paling bijaksana akan mencapai tempat di atas dan yang jahat serta malas akan tinggal di bawah. Pendidikan harus menjunjung tinggi moral maupun akal, pikiran yang rasional harus berdasarkan disiplin diri dan ajaran agama. Mill berpendapat bahwa persamaan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan adalah syarat utama untuk mencapai masyarakat yang adil, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua (Evans, 1979). Gerakan perempuan di Inggris pada waktu itu mengutamakan perjuangan memperoleh hak pilih yang mengalami tantangan keras, sehingga menuntut banyak pengorbanan.

Setelah Revolusi Amerika berakhir (1861-1863) kaum perempuan mulai ikut bergerak dalam rangka pembaharuan kehidupan agama. Terbentuknya banyak organisasi sukarela yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan di bidang moral, sosial, pendidikan dan perikemanusiaan pada umumnya. Begitupula kaum perempuan berperan dalam gerakan anti perbudakan yang dimulai tahun 1830. Tetapi disayangkan bahwa mereka akhirnya tidak boleh menjadi peserta dalam Konvensi Anti Perbudakan Sedunia yang diselenggarakan di London tahun 1840. Kejadian yang mengecewakan ini mendorong perempuan mengadakan kegiatan-kegiatan yang langsung mengenai kepentingan perempuan, misalnya di bidang hukum agar istri berhak atas miliknya sendiri setelah menikah. Kejadiannya memuncak tahun 1848 ketika diadakan Konvensi Hak-hak Perempuan di kota Seneca Falls. Banyak tuntutan dikemukakan mengenai persamaan hak di semua bidang kehidupan. Perhatian dipusatkan pada 3 hal, agar memperoleh hak memiliki pendapatan hasil pekerjaan sendiri, hak atas anak-anak setelah perceraian dan hak pilih

(hak pilih baru diberikan pada perempuan pada tahun 1920 untuk seluruh Amerika Serikat, yaitu 70 tahun setelah diperjuangkan).

Setelah memiliki hak pilih, maka kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi perempuan terutama dilakukan di bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu makin banyak perempuan memasuki lembaga-lembaga pendidikan, juga di perguruan tinggi. Dalam tahun 1950-an lebih dari sepertiga jumlah perempuan bekerja di luar rumah secara penuh, tapi banyak mengalami diskriminasi dalam pekerjaan: pria lebih cepat diberikan kesempatan maju dan menerima upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama (Yates, 1977: 3). Kecemasan perempuan makin memuncak dalam tahun 1960-an karena pengalaman pahit yang diderita oleh perempuan muda yang aktif dalam gerakan hak sipil dan dalam New Left yang radikal. Maka timbullah "Women Liberation Movement" yang radikal. Gerakan ini mencakup berbagai kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tetapi yang paling radikal adalah yang ingin mengubah masyarakat dimana perempuan memisahkan diri dari laki-laki, yang dianggap penindas perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. "Women's Lib" sangat vokal sehingga sering disamakan dengan gerakan perempuan di dunia Barat pada umumnya.

Terdapat beberapa gerakan feminisme yang masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri, misalnya feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme psikoanalitik, feminisme eksistensial, feminisme pasca-modern.

Pergerakan Perempuan di Indonesia

Sejarah gerakan perempuan di Indonesia menunjukkan kemiripan dengan gerakan perempuan di negara-negara yang pernah mengalami penjajahan oleh negara-negara Barat.

Pada umumnya gerakan perempuan sebagai gerakan sosial tidak muncul tiba-tiba melainkan merupakan perkembangan dalam masyarakat di mana ada perasaan cemas dan ada keinginan-keinginan individu-individu yang menghendaki perubahan dan yang kemudian bergabung dalam suatu tindakan bersama. Di Indonesia, proses itu sudah menjelma pada abad ke-19 dalam bentuk peperangan di banyak daerah di bawah pimpinan para raja atau tokoh-tokoh lain melawan masuknya dan meluasnya penjajahan Belanda, misalnya di Banten, Yogyakarta, Rembang, Maluku, Palembang, Minangkabau, Banyumas, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, Aceh (Sukanti Suryochondro, 1984: 68-69).

Dalam peperangan tersebut dikenal beberapa tokoh perempuan, antara lain Martha Christina Tiahahu (wafat 1818), Cut Nyak Dien (wafat 1928), Cut Meutia (wafat 1910), Nyai Ageng Serang (wafat 1928). Perlawanan terhadap Belanda gagal karena kalah persenjataan dan alat komunikasi.

Pada permulaan abad ke-20 terjadi perubahan dalam politik penjajahan Belanda yang dinamakan Politik Etis sebagai pengaruh pikiran beberapa tokoh Belanda yang progresif, yang menyatakan bahwa Belanda berhutang budi pada tanah jajahannya yang disebut Hindia Belanda, karena sekian lama sudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah dari jajahannya, sedangkan rakyat pribumi hidup dalam kesengsaraan. Maka menjadi kewajiban Belanda agar mensejahterakan rakyat jajahannya. Belanda memberikan pendidikan, tetapi kesempatan memperoleh pendidikan hanya terbatas pada golongan tertentu saja, tidak untuk seluruh rakyat (Tweede School, Hollands Inlandse School). Pendidikan yang diberikan Belanda tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, melainkan untuk mendapatkan cukup tenaga terdidik untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan Hindia Belanda.

Politik Etis hanya didukung oleh sejumlah kecil bangsa Belanda, sebagian besar mementingkan kedudukan Belanda sebagai penjajah. Terdapat di antara golongan kecil orang Indonesia yang berpendidikan Barat berkeinginan untuk meneruskan cita-cita untuk memajukan dan memerdekakan bangsa, diantaranya adalah Kartini, ia prihatin melihat rakyat sengsara di bawah sistem kolonialisme, karena miskin dan kurang pengetahuan. Dan yang paling menderita adalah kaum perempuan, karena selain mengalami penjajahan juga adat-istiadat yang mengekang dan tidak adil bagi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Kartini mengalami sendiri ketidakadilan dalam keluarga dengan sistem poligami, dimana cenderung timbul pertentangan. Dia berkali-kali mendengarkan cerita yang menyedihkan mengenai nasib istri yang dimadu, mengenai perempuan yang dipaksa kawin dengan seseorang yang tidak dikenal.

Kartini yakin bahwa pendidikan yang dapat memberikan jalan keluar. Pendidikan akan memberi kemampuan pada rakyat untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, dan pendidikan akan meningkatkan kedudukan perempuan. Semangat nasionalisme ini mendorong terbentuknya perkumpulan-perkumpulan. Tiga Saudari Kartini menyerukan dalam surat kabar *De Locomotief* di Semarang pada tanggal 2 Juli 1908, agar kaum muda membentuk organisasi supaya dengan

berkomunikasi dan kerjasama maka cita-cita akan terlaksana. Pada tahun 1908 mahasiswa sekolah kedokteran di Jakarta STOVIA mendirikan Boedi Oetomo. Atas prakarsa dan bantuan organisasi ini dibentuklah organisasi perempuan Poetri Mardika (1912). Organisasi ini didirikan karena adanya keyakinan bahwa kaum perempuan perlu digerakkan agar pemikiran-pemikiran tentang kemajuan bangsa lebih muda disebarluaskan. Menurut laporan dalam majalah Poetri Mardika No. 5, Agustus 1915, jumlah anggota adalah 132, diantaranya adalah perempuan. Masa dasawarsa pertama abad ke-20 dikenal sebagai masa Kebangkitan Nasional. Perempuan dianggap mempunyai potensi besar sebagai pendidik untuk kemajuan bangsa, maka perlu diberi kesempatan menempuh pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Organisasi perempuan adalah wadah agar perempuan belajar memperluas wawasan, tampil di muka umum, memikirkan masalah masyarakat di luar lingkungan domestik.

Semangat persatuan melawan kolonialisme makin kuat, organisasi- organisasi politik bekerjasama dan menunjukkan tuntutan agar pada golongan pribumi diberikan kedudukan politik yang lebih baik, demikian pula kelompok- kelompok pemuda menunjukkan persatuan dengan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta diadakan pada 22 Desember 1928 dengan semangat persatuan nasional.

Kongres tersebut membentuk federasi antara organisasi perempuan yang bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan pada tahun 1929 berganti menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Dalam Kongres PPII tahun 1935, kewajiban utama wanita Indonesia adalah sebagai “Ibu Bangsa” yang menunjukkan wawasan perempuan yang lebih luas daripada sebelumnya. Menurut anggapan tradisional, ibu (istri) berkewajiban menjaga kelestarian keluarga, secara mental menjaga kehidupan kebudayaan dalam keluarga, menumbuhkan kasih sayang, tolong menolong kerukunan, sopan-santun, spiritual; sedangkan laki-laki (suami) berkewajiban ke luar untuk mencari penghasilan guna menghidupi keluarga dan mencari kedudukan dalam masyarakat. Istilah perempuan sebagai Ibu Bangsa memberi tanggungjawab yang lebih besar, tidak terbatas kepada keluarga. Perempuan harus menjaga kelestarian masyarakat bangsa, kesejahteraan, kebudayaan, kehidupan spiritual, rasa kemanusiaan. Pernyataan ini dikemukakan dalam tahun 1930-an, perempuan berkewajiban melestarikan masyarakat duni sehingga lebih manusiawi dan damai.

Pada kongres tahun 1938 diputuskan agar tanggal 22 Desember, hari pertama kongres dijadikan Hari Ibu dengan lambang “Merdeka Melaksanakan Dharma”. Hari Ibu dimaksudkan untuk menyadarkan kembali tanggungjawab perempuan terhadap masyarakat termasuk keluarga, bukan untuk mengagungkan ibu seperti Mother’s Day di Barat, sedangkan semboyan “Merdeka Melaksanakan Dharma” mempunyai arti bahwa kemerdekaan bagi perempuan memungkinkan melaksanakan misinya dalam hidup yaitu melestarikan kehidupan.

Tujuan PPIP untuk meningkatkan kedudukan perempuan mempunyai dasar yang luas yaitu persatuan antara organisasi perempuan, kebangsaan dalam arti cinta pada tanah air dan bangsa dan kenetralan terhadap semua agama sehingga mencakup organisasi perempuan dari berbagai agama. Pada tahun 1945 Wanita Indonesia (WAN) dan Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) bersatu dalam Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang bertujuan menuntut dan mempertahankan keadilan sosial, agar keselamatan perikemanusiaan dalam masyarakat Indonesia terjamin. Pada tahun 1946 federasi diberi nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), nama yang tetap hingga saat ini.

Masa Pendudukan Jepang

Selama pendudukan Jepang (1942-1945), kelompok perempuan Indonesia digerakkan oleh penguasa balatentara Nippon untuk melakukan kegiatan membantu memenangkan peperangan. Kegiatan tersebut terdiri dari usaha mengatasi kesulitan penduduk di masa perang dengan memanfaatkan pekarangan yang ditanami tanaman yang dapat menghasilkan bahan makanan, kerajinan tangan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian, juga menanam kapas yang dapat menghasilkan bahan untuk dibuat kaos kaki bagi tentara, menanam jarak yang menghasilkan minyak pelumas untuk angkatan perang. Juga dibentuk kelompok pemuda yang diberi latihan militer yang disiapkan untuk menjadi pasukan tempur apabila diperlukan. Perempuan saat itu hanya dijadikan sebagai alat propaganda Jepang. Motivasi perempuan yang ikut dalam kegiatan Fujinkai (perkumpulan perempuan) dan seksi-seksinya adalah bervariasi: ada yang terpaksa sebagai istri pejabat, istri pegawai pamong praja; ada yang berambisi mendapat pengakuan dan penghargaan dari penguasa dan ada pula yang hanya ingin tahu kegiatan apa yang dilakukan. Meskipun demikian, ternyata bahwa pengalaman melakukan berbagai kegiatan tersebut bermanfaat dalam perjuangan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Beberapa pemimpin pergerakan perempuan nasional ikut dalam Fujinkai dengan pertimbangan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam perkumpulan tersebut akan bermanfaat dalam persiapan untuk kemerdekaan bangsa, karena Fujinkai merupakan satu-satunya organisasi yang diizinkan oleh penguasa Jepang. Sebagai pemimpin dan anggota organisasi-organisasi perempuan nasional tidak ikut serta dalam perkumpulan-perkumpulan perempuan yang dibentuk oleh penguasa Jepang karena tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan perempuan dan kemerdekaan bangsa tetapi tetap mengadakan hubungan secara informal dan secara diam-diam mencari jalan untuk mempertahankan cita-cita nasional. Setelah pembentukan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1943 di Jakarta mendapat kepercayaan oleh rakyat karena lebih bersifat nasional dibawah pimpinan Empat Serangkai: Bung Karno, Bung Hatta, Kyai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. Secara struktural PUTERA mempunyai bagian perempuan yang bertugas memperhatikan kepentingan perempuan dan tugas-tugas yang dapat diberikan kepada perempuan. Disamping itu terbentuk secara sukarela kelompok perempuan membantu pekerjaan di lapangan yang menamakan diri Barisan Pekerja Perempuan PUTERA. Hal ini tidak dikehendaki oleh penguasa Jepang, sehingga pada tanggal 1 Maret 1944, PUTERA dibubarkan dan dibentuk lembaga baru Jawa Hokokai (Himpunan Kabaktian Rakyat Jawa) dengan pengawasan yang lebih ketat, meskipun Bung Karno dan Bung Hatta tetap memegang pimpinan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 disambut dengan semangat yang meluap-luap oleh rakyat, setelah mengalami penderitaan selama pendudukan Jepang. Pada bulan Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di pelabuhan kota-kota besar di Nusantara, yang akan melucuti senjata tentara Jepang yang sementara bertugas "menjaga status quo". Dalam tentara Sekutu termasuk tentara Jepang ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pertempuran meletus antara tentara Sekutu dengan kelompok gerilyawan yang hendak mempertahankan kemerdekaan Republik yang telah diproklamasikan. Dibentuklah WANI (Wanita Republik Indonesia) yang menyelenggarakan dapur umum untuk tentara gerilyawan dan penjahitan untuk membantu gerilyawan dengan pakaian seragam, korban-korban kebakaran dan menyediakan bendera-bendera merah putih. Dalam suasana tegang tersebut, kaum perempuan mengumpulkan uang sumbangan untuk dapat mendirikan Tugu Kemerdekaan di halaman Pegangsaan Timur 56, merayakan ulang tahun Proklamasi Republik meskipun dihalang-halangi oleh tentara Sekutu.

Saat itu terbentuklah laskar-laskar wanita atas prakarsa sendiri yang memperoleh latihan dari lembaga militer mengenai keterampilan dalam menembak, penyusupan ke wilayah musuh, pekerjaan Palang Merah. Nama-nama laskar terkenal adalah misalnya Barisan Putri (sebagian lanjutan dari zaman pendudukan Jepang), Laskar Wanita Indonesia (LASWI) yang dimulai di Bandung, Laskar Putri Indonesia (WPP) di Yogyakarta, Laskar Muslimat berpusat di Bukit Tinggi, Sabil Muslihat berpusat di Padang Panjang, Juga terbentuk laskar wanita di Magelang, Madiun, Padang, Solok, Sawahlunto. Pelajar perempuan menggabungkan diri pada Tentara Pelajar dan Corps Mahasiswa.

Beberapa aspek menarik mengenai laskar wanita. Pertama, terbentuknya laskar yang terdiri dari perempuan yang bertugas di belakang maupun di depan garis peperangan berarti perempuan memasuki bidang yang biasanya merupakan bidang laki-laki. Bekerja di dapur umum atau merawat orang-orang luka dapat dikatakan pekerjaan tradisional bagi perempuan, tetapi berjuang di lapangan dengan menggunakan senjata, menyusup ke daerah musuh dan lain-lain tindakan yang diperlukan dalam peperangan dianggap bukan sewajarnya tugas perempuan. Tidak mengherankan bahwa sementara orangtua dengan berat hati melepaskan putrinya yang berumur 15 dan 18 tahun masuk laskar wanita, seperti yang terjadi di Bandung (Totok Sapto Gondo, 1981: 32). Masyarakat umumnya menganggap perempuan tentara tidak wajar. Tetapi pada dalam sejarah terdapat tokoh-tokoh perempuan yang ikut berperang membela tanah air seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Nyai Ageng Serang dalam abad ke-19. Bahkan menurut catatan sejarah, dalam abad ke-18 dan ke-19 pasukan perempuanlah yang menjaga dan membela keraton di Jawa Tengah sehingga Belanda terheran-heran melihat keberanian dan keperkasaan "prajurit-prajurit estri" (Peter Carey dan Vincent Houben, 1987: 19). Kedua, pejuang perempuan tidak dicemoohkan atau diremehkan prestasinya oleh pejuang laki-laki, hal ini sama halnya dengan pejuang perempuan untuk hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang mengakibatkan timbulnya Women's Lib sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil. Bahkan pejuang perempuan diberi bantuan dan bimbingan dari pejuang TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Hal menarik lain yang menarik perhatian adalah mengapa dibentuk laskar perempuan khusus padahal sudah ada, misalnya kelompok gerilyawan Tentara Pelajar dan Corps Mahasiswa?. Hal ini menunjukkan adanya aspek feminisme dalam laskar perempuan yaitu meningkatkan kedudukan dan peran perempuan, nasionalisme dan persatuan. Di kalangan istri anggota Angkatan Bersenjata, terbentuklah PERSIT (Persatuan Istri Tentara)

Chandra Kirana tahun 1946. Terdapat juga istri Angkatan laut menjadi fusi dengan nama Jalasenastri pada tahun 1957.

Di bidang politik, kaum perempuan pertama kali ikut pemilihan umum pada tahun 1955 dengan hasil anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 17 orang yang berarti 0,7% dari anggota seluruhnya 255 orang. Organisasi perempuan yang paling terlibat dalam pemilihan umum tersebut tentunya organisasi perempuan yang merupakan bagian dari atau berafiliasi dengan partai politik. Organisasi perempuan yang merupakan bagian dari partai politik, misalnya Parkiwa dari Partai Kebangkitan Bangsa (1950), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) dari Partai Komunis Indonesia (1950), Persatuan Wanita Murba (Perwamu) dari Partai Murba (1950), Wanita Demokrat Indonesia dari Partai Nasional Indonesia (1951), Wanita Nasional dari Partai Indonesia Raya (1953) dan Gerakan Wanita Sosialis (GWS dari Partai Sosialis Indonesia.

Partai politik dibentuk karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin dalam UUD 1945 pasal 28, juga timbul organisasi-organisasi perempuan baru di berbagai bidang, misalnya menurut profesi: Ikatan Guru Taman Kanak (1950), Ikatan Bidan Indonesia (1951), Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (1956), Ikatan Ahli Kecantikan Wijaya Kusuma (1958). Hal ini menunjukkan makin banyaknya perempuan berkarir. Juga di lembaga pemerintahan, umumnya didirikan atas inisiatif secara spontan dan demokratis mengikuti pola pengorganisasian perkumpulan.

Hal tersebut adalah pola pembentukan organisasi perempuan dalam periode pertama dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sampai dengan tahun 1958 yang dinamakan masa Demokrasi Liberal, yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Masa Demokrasi Terpimpin

Pada periode ini ada beberapa organisasi dalam lingkungan lembaga pemerintahan yang semula merupakan organisasi setempat kemudian dikoordinasikan dan disatukan dengan petunjuk atau bimbingan dari atasan. Contohnya adalah ADHATA (Ikatan Dharma Wanita) tahun 1965, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proses persatuan menjadi fusi atau federasi ini sudah berlangsung dalam periode sebelumnya dan menjadi lebih besar dan kuat dan pengorganisasinya lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh faktor kekuasaan agar organisasi lebih mudah diarahkan.

Peranan pergerakan perempuan dalam periode ini “ambigous” (tidak menentu). Dalam periode ini “perjuangan pergerakan perempuan Indonesia untuk mempertinggi derajat wanita justru menjadi kabur karena merosotnya penghargaan terhadap perempuan yang dilakukan pemimpin negara”. Tetapi sebaliknya organisasi-organisasi perempuan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan negara, misalnya dalam pembebasan Irian Barat. Terbentuklah Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) (22 Desember 1961), Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) (5 Januari 1963) dan Korps Wanita Angkatan Udara (KOWARA) (12 Agustus 1963) dan Polisi Wanita (POLWAN) tahun 1948. Semua itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa “tiap warga negara (laki-laki dan perempuan) berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Dalam periode ini juga terbentuk federasi antara organisasi pegawai wanita di lembaga pemerintahan pada tanggal 25 Mei 1961 dengan nama Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen (IKWANDEP) yang bertujuan memperjuangkan perbaikan nasib kaum perempuan Indonesia pada umumnya dan para karyawan khususnya dan memperjuangkan penghargaan serta pengembangan karir pada karyawan dalam bidang tugasnya masing-masing. PERSATWI pada tahun 1964 termasuk Kosi Wanita Sekber Golkar (Koordinasi Wanita Sekretariat Bersama Golongan Karya) dan kemudian menjadi Korpri (Korps Pegawai Negeri) bagian wanita. Sekber Golkar terdiri dari golongan fungsional dan profesi yang tidak tergabung dalam partai politik, antara lain ABRI, serikat pekerja, organisasi pemuda dan organisasi perempuan, dengan tujuan menanggulangi pertentangan- pertentangan sosial dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia terlibat, menimbulkan kegoncangan yang besar di Indonesia. Dalam usaha memulihkan ketertiban dan keamanan kaum perempuan juga mengambil peranan. GERWANI yang merupakan bagian dari PKI dihentikan keanggotaannya dalam KOWANI. Sejumlah organisasi KOWANI membentuk Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) yang bersama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melakukan demonstrasi dan pernyataan agar PKI dan ormasnya dibubarkan.

Orde Baru

Permulaan Orde Baru ditandai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang diberikan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Pemerintah Orde Baru mengutamakan pembagunan ekonomi mengingat rakyat telah sekian lama hidup dalam kekurangan. Keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa Bangsa yang diputuskan pada 1 Januari 1965, dipulihkan kembali. Hubungan dengan luar negeri diperluas, khususnya dibidang ekonomi untuk menambah investasi dari luar, hal ini berdampak juga pada pergerakan perempuan. Setelah tahun 1966 makin banyak organisasi perempuan didirikan di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta. Muncul organisasi perempuan berdasarkan profesi, seperti Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) (1967), Ikatan Wanita Penguasa Indonesia (IWAPI) dan Indonesia Business and Professional Women Association (1975) dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (1971). Ini menunjukkan makin banyaknya perempuan yang mendapatkan kesempatan berkarir, juga makin banyaknya perempuan yang dapat mengikuti pendidikan. Dengan masuknya Indonesia kembali sebagai anggota PBB, maka atas dibentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) (1968) dengan tujuan untuk ikut meningkatkan kedudukan perempuan dengan berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan penelitian ilmiah dan membuat rekomendasi tentang cara-cara meningkatkan peranan perempuan. KNKWI adalah badan semi pemerintah yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pergerakan perempuan dan ahli-ahli perorangan.

Hubungan luar negeri yang dilakukan organisasi perempuan lebih banyak dengan organisasi perempuan di negara Barat dan ASEAN, tidak lagi dengan organisasi perempuan di negara sosialis dan komunis seperti pada zaman Orde Lama. Ikut dalam penentuan tahun 1975 sebagai Tahun Wanita Internasional dengan tujuan agar pemerintah masing-masing negara anggota PBB dan masyarakat secara khusus memperhatikan keadaan penduduk perempuan. Demikian pula dengan penentuan Dasa Warsa Perempuan Internasional tahun 1976-1985. Hal ini berhubungan dengan Konferensi Internasional tahun 1975 di Mexico City, tahun 1980 di Kopenhagen, dan tahun 1985 di Nairobi yang dihadiri oleh wakil pemerintah negara anggota PBB untuk menyusun Rencana Kegiatan Sedunia. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan segala macam masalah yang dihadapi perempuan di semua bidang kehidupan, juga bertukar pikiran dan pengalaman sehingga menambah wawasan mengenai perjuangan perempuan di seluruh dunia, kemajuan apa yang telah tercapai dan hambatan yang dialami.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dari PNN yang diterima oleh Sidang Majelis Umum tanggal 18 Desember 1979 dan oleh pemerintah Indonesia telah diratifikasi sehingga menjadi undang-undang No. 7 tahun 1984. Dalam Konvensi tersebut ditegaskan pentingnya persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan, dalam masyarakat maupun keluarga demi tercapainya kesejahteraan dalam negara dan perdamaian di dunia.

Reformasi

Gerakan perempuan terlihat dalam Undang-undang mengenai pemilihan umum, partai politik berkewajiban mencalonkan perempuan sebagai calon anggota eksekutif sebanyak 30%, namun pada pemilihan umum tahun 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10 atau 7%, hanya 28 orang dari jumlah total anggota parlemen (sebanyak 550) untuk periode 2004-2009. Angka ini belum bisa mewakili aspirasi perempuan dalam politik sebagai wakil rakyat.

UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Hal ini terlihat dari hasil pemilu 2009 memberikan kenaikan perwakilan/representasi perempuan di DPR. Dilihat dari pencalonan perempuan, rekapitulasi KPU menunjukkan jumlah keseluruhan caleg perempuan mencapai 34,6% atau setara 3.910 caleg perempuan dari total 11.130 caleg untuk DPR RI. Dari 38 partai politik peserta pemilu, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) merupakan partai dengan pencalonan perempuan terbanyak (45%). Sedangkan yang paling rendah adalah Partai Patriot yaitu 19,66%. Sebanyak 8 partai menawarkan lebih dari 40% calon perempuan, 24 partai lainnya mencapai 30%, sedang 6 partai yang gagal mencalonkan minimal 30% perempuan.

Terdapat 5 partai yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1 (satu) terbanyak yaitu PBUI (38,4%), PPPI (32,5%), Partai Pelopor (30,4%), PIB (28,9%) dan Partai Buruh (28,9%). Partai yang lolos parliamentary threshold adalah Partai Demokrat yang tertinggi menempatkan caleg perempuan pada urutan nomor 1 (satu) (18,2%), sedangkan partai yang paling sedikit menempatkan caleg

perempuan pada urutan teratas adalah PKS (2,6%), PDIP (2,6%), PKNU (7,8%), Patriot (8,1%) dan PDS (9,1%).

Sejalan dengan DPR RI, jumlah perempuan di DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) juga mengalami peningkatan pada hasil Pemilu 2009. Pada pencalonan anggota DPD, calon perempuan mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,8%, pada Pemilu 2009 meningkat jumlahnya menjadi 11,3%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27% atau 36 calon perempuan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Pada situasi Pemilu 2004, calon perempuan relatif lebih kondusif untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan umum anggota DPD karena pencalonan mereka tidak melalui partai politik.

Kenaikan cukup signifikan juga terjadi di parlemen tingkat lokal. Hanya beberapa provinsi seperti NAD, Jambi dan Bali yang jumlah anggota perempuan DPRD konstan dari Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Sementara data representasi politik perempuan di tingkat kabupaten/kota juga meningkat. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki keterwakilan anggota perempuan. Hal ini berbeda dengan Pemilu 1999.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sekedar jumlah. Hal ini merupakan tantangan bagi gerakan perempuan dan partai politik untuk memperbaiki kualitas representasi politik. Gerakan perempuan harus benar-benar merefleksikan ideologi dan kepentingan perempuan. Di sisi lain partai politik juga harus memperhatikan mekanisme internal dalam hal rekrutmen, promosi dan pengkaderan sehingga dapat menghasilkan calon-calon yang siap dan mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, Peter dan Vincent Houben. 1987. *Sprited Srikandhis and Sly Sumbadras: the social, political and economic role of women at the central Javanese court in the 18th and early 19th centuries* dalam Locher-Scholthen, Elsbeth Anke Niehof (ed) *Indonesian Women in Focus*. Dordrecht, Holland: Foris Publication.
- Evans, Richard J. 1977. *The Feminists*. London: Croom Helm Ltd.
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 2004. *Getar Gender (Buku Pertama) Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Indonesiatara.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Totok Sapto Gondo. 1981. *Laskar Wanita Indonesia (LASWI)*. Skripsi Sarjana Sastra, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta